
Akuntabilitas pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur

Yunita Fitria

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

E-mail: yunita.fitria@feb.unmul.ac.id

Abstract

The study aims to test the accountability of the organization in the mosques located in Balikpapan, Kalimantan Timur. This study uses the concept of accountability mechanisms presented by Ebrahim (2003). Data is collected by interview, observation, field notes and document analysis. The study uses semi-structures interview used to explore the perception of mosque board. This study examines 3 mosque organizations and 15 people became interviewees. An interesting result in the study was informal accountability form in Balikpapan mosque. The study consisted of only a few people interviewed, so the results should be interpreted in context and not generalizable. The limitations of this study were that most mosques could not show the full financial report due to the confidentiality of their financial statements. These findings illustrated to the government about informal accountability in mosques. Thus, this study provides an overview of other studies to see more about accountability in non-profit organizations.

Keywords: Accountability, non profit organization, Balikpapan, mosque

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu akuntansi dan sistemnya masih memiliki banyak tantangan, yaitu korupsi, penipuan dan skandal manipulasi dalam organisasi nirlaba seperti Enron dan Worldcom. Tantangan-tantangan ini tidak hanya dihadapi organisasi nirlaba, tetapi juga oleh non-profit dan organisasi keagamaan (Gibelman dan Gilman, 2001; Gibelman dan Gilman, 2002; Fremont - Smith, 2004; Greenlee et al, 2007). Hal ini juga dibuktikan dengan Laporan 2012 Marquet di Penggelapan di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa non-profit dan organisasi keagamaan memiliki sekitar seperdelapan dari seluruh insiden penggelapan utama. Skandal ini telah menunjukkan non-profit dan organisasi keagamaan kurang transparansi dan akuntabilitas keuangan (Duncan et al, 1999; Duncan dan Flesher, 2002; Jacking et al, 2007; Dhanani dan Connolly, 2012).

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai menuntut dan memberikan account (Roberts dan Scapens, 1985), di mana menuntut adalah dari kepala sekolah (manajemen) dan pemberian adalah tanggung jawab agen (masyarakat dan organisasi). Akuntabilitas ditunjukkan oleh individu dan organisasi 'tindakan, tidak hanya melalui pelaporan dan pengungkapan persyaratan, tetapi juga dalam tanggung jawab mereka kepada publik dalam hal nilai-nilai organisasi dan kinerja (Ebrahim, 2003). Dengan kata lain, akuntabilitas adalah gagasan manusia dalam organisasi untuk menerapkan target untuk masyarakat.

Penelitian ini menguji akuntabilitas digunakan dalam organisasi Islam, yaitu masjid. Oleh karena itu, konsep akuntabilitas dalam penelitian ini diperluas ke perspektif Islam yang berhubungan dengan konsep taklif (akuntabilitas). Ini menyangkut fakta bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya atau kelambanan di akhirat (Al-Safi, 1992). Ada beberapa penelitian dari organisasi Islam yang mencakup konsep taklif (Abdul Rahman dan Goddard, 1998; Siraj et al, 2007; Sulaiman et al, 2008; Nahar dan Yaacob, 2011) akuntabilitas. Islam menekankan bahwa informasi akuntansi harus menghasilkan efek bagi masyarakat dan menunjukkan tanggung jawab kepada Allah. Oleh karena itu, konsep akuntabilitas dalam Islam dipandang dalam konteks sakral, dan berbeda dari agama organisasi Gereja.

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang praktik akuntansi di masjid (Siraj et al, 2007; Sulaiman et al, 2008; Adnan, 2013; Said et al, 2013). Studi ini menunjukkan pentingnya dan kebutuhan akuntabilitas dalam praktik akuntansi di masjid-masjid seperti manajemen, pengendalian internal dan sistem anggaran. Masjid adalah tempat dimana agama tumbuh sehingga ada komunitas Muslim yang

memiliki kegiatan di masjid. Dengan demikian, kegiatan harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Jumlah masjid di Indonesia berdasarkan statistik adalah 643.834, yang 2.178 berada di Kalimantan Timur. Selain itu, jumlah penduduk Kalimantan Timur dianggap 'buruk' telah meningkat dari 247.900 Maret 2011 menjadi 253.340 pada Maret 2012. Meskipun statistik ini, pendapatan per kapita untuk Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi kedua setelah DKI (Daerah Khusus Ibukota, atau wilayah khusus ibukota) Jakarta, ibukota Indonesia. Oleh karena itu, menurut disparitas ekonomi di Kalimantan Timur, fungsi masjid Indonesia dapat digunakan berpotensi untuk mengurangi masalah kemiskinan.

Meskipun pentingnya masjid sebagai organisasi keagamaan, Duncan et al. (1999) telah menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi keagamaan yang bermasalah. Oleh karena itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk organisasi keagamaan dalam hal penelitian akuntabilitas, terutama masjid. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk literatur pada isu akuntabilitas organisasi keagamaan di Indonesia. Praktis, penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk pemahaman tentang praktek akuntansi di masjid dalam hal memberikan akuntabilitas dalam masjid-masjid. Selain itu, penelitian ini akan memberikan efek regulasi, dalam hal ini pemerintah sebagai fungsi pengendali kebijakan di akuntabilitas masjid. Jadi, jika akuntabilitas jelas terlihat di masjid-masjid sebagai kepercayaan publik, itu akan mendukung pemecahan masalah kemiskinan di masyarakat. Artikel ini terbagi beberapa bagian, yaitu tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas dan Mekanisme Pertanggungjawaban

Lee (2004) menyoroti akuntabilitas sebagai kata yang sangat trendi dalam perdebatan globalisasi. Akuntabilitas berasal dari "akun" kata yang berasal dari Old French conter, yang berarti untuk menceritakan sebuah cerita, dan dari akhir *accomputare* Latin, yang berarti untuk menghitung (Boland dan Schultze, 1996). Mereka mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah penjelasan tentang cerita dan perhitungan yang melibatkan nilai moral. Refleksi perhitungan menciptakan makna nilai yang mengungkapkan angka dalam laporan keuangan. Namun, masalah akuntabilitas muncul dari para praktisi sistem legislatif sendiri, kontrak dan mekanisme (Scott, 2000). Pelaku bisa dikatakan orang-orang yang terlibat dalam fungsi legislasi, kontrak, dan organisasi mekanisme sebagai representasi akuntabilitas.

Mekanisme akuntabilitas memberikan keuntungan kepada masyarakat umum, dan terutama kepada orang-orang miskin (Huque, 2011). Disiplin fiskal merupakan salah satu pertimbangan dari sisi hukum dalam penelitian Huque ini. Dengan demikian, disiplin fiskal atau pengelolaan dana publik dapat didistribusikan secara merata kepada orang yang benar-benar membutuhkan dana. Interestingly, Ebrahim (2003) mengusulkan membagi mekanisme akuntabilitas menjadi lima mekanisme, yaitu laporan pengungkapan; penilaian kinerja dan evaluasi; partisipasi; regulasi diri; dan audit sosial. Mekanisme ini diterapkan di organisasi non-pemerintah (LSM). LSM merupakan sektor yang membutuhkan mekanisme akuntabilitas dalam aplikasi mereka. O'Dwyer (2007) menekankan bahwa konsentrasi LSM adalah pada "unsur-unsur sosial", seperti kesejahteraan manusia, hak-hak dan pembangunan. Oleh karena itu, Ebrahim (2003) menyoroti mekanisme dalam konsep, yang terdiri dari alat-alat dan proses. laporan pengungkapan adalah alat, penilaian kinerja cenderung proses, self-regulation dan partisipasi yang lebih banyak alat dan proses, dan terakhir, audit sosial adalah bagian dari proses.

Namun, studi ini berfokus pada organisasi non-profit, dan organisasi keagamaan. Siraj et al. (2007) menyatakan bahwa organisasi keagamaan memiliki fitur yang sama yang bertujuan untuk membuat penggunaan terbaik dari sumber daya sebagai penyedia sumbangan masyarakat. Penelitian Ebrahim berfokus pada LSM sebagai organisasi non-profit. Oleh karena itu, mekanisme akuntabilitas Ebrahim akan digunakan dalam penelitian ini karena mekanisme yang sesuai untuk organisasi keagamaan sebagai organisasi non-profit. Memang, Hardy dan Ballis (2013) menyatakan bahwa organisasi keagamaan lebih cocok dalam memberikan pertanggungjawaban. Mereka menemukan pengaturan agama lebih informal dalam melakukan proses akuntabilitas. Penelitian ini berfokus pada

pengaturan agama yang merupakan masjid sebagai organisasi non-profit. Dengan demikian, konsep mekanisme akuntabilitas dalam pengaturan agama, yang bersifat informal, dapat dideteksi mirip dengan masjid.

Konsep Akuntabilitas dalam Sistem Keyakinan Berbeda

Al - Faruqi (1995) memperluas batas tindakan dalam akuntabilitas, dalam hal ini melampaui perspektif ke Allah. Ini berarti bahwa individu harus bertanggung jawab kepada Allah sebagai Pencipta mereka. Singkatnya, pada bagian ini lebih membahas sistem kepercayaan akuntabilitas dalam konteks agama. Ada sedikit literatur tentang akuntabilitas dalam organisasi keagamaan. Beberapa penelitian merupakan literatur tentang akuntabilitas, yaitu di organisasi Kristen (Edwards, 1990; Laughlin, 1988; Laughlin, 1990; Booth, 1993; Bowrin, 2004; Jacobs dan Walker, 2004; Quattrone, 2004); di organisasi Islam (Abdul Rahman dan Goddard, 1998; Siraj et al, 2007; Sulaiman et al, 2008; Ahmad - Zamri, 2010; Nahar dan Yaacob, 2011); dan di Buddha dan Hindu (Jayasinghe dan Soobaroyen, 2009).

Pertama, sistem kepercayaan akuntabilitas dalam organisasi Kristen terdiri dari dua sakral dan sekuler. Laughlin (1990) melihat akuntabilitas dalam konteks agama sebagai dikotomi antara sakral dan sekuler. Dengan kata lain, akuntansi adalah bagian dari konsep sekuler, dan menggambarkan mendukung kegiatan dalam konteks sakral (Laughlin, 1988; Laughlin, 1990; Booth, 1993). Namun, sakral dan sekuler dilambangkan sebagai pengalaman, perspektif dan sudut pandang dalam individu (Jacobs dan Walker, 2005; Jacobs, 2005). Ini berarti bahwa sakral dan sekuler yang tertanam dalam individu. Dengan kata lain, aktivitas sekuler tertanam dalam kegiatan keagamaan dan bukan merupakan kegiatan dikotomis. Menariknya, Quattrone (2004) menemukan bahwa pandangan suci atau sekuler memiliki sedikit pengaruh dalam Serikat Yesus pada abad ke-17. Ada beberapa bukti dari berbagai jenis sistem akuntansi, seperti akuntansi untuk dosa dan akuntansi untuk jiwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi dan akuntabilitas dalam hal konteks sakral dan sekuler tergantung pada apa tujuan gereja atau organisasi keagamaan ingin dicapai.

Selain itu, ada fitur sistem kepercayaan dalam organisasi Islam. Pertama, Abdul Rahman dan Goddard (1998) mempelajari akuntabilitas dalam organisasi Islam di Malaysia. Studi mereka menemukan bahwa dikotomi dunia sakral dan sekuler tidak berlaku dalam Islam. Pandangan dunia Islam terdiri dari dua aspek duniawi dan aspek sakral, di mana aspek duniawi harus terkait dengan cara yang mendalam dan tak terpisahkan dengan aspek suci, dan aspek sakral harus memiliki lebih banyak pengaruh dan signifikansi penting (Abdul Rahman, 2010). Dengan kata lain, aspek sekuler harus siap untuk melayani aspek akuntabilitas dalam Islam adalah lebih ke arah persiapan untuk Tuhan.

Selain itu, sistem kepercayaan akuntabilitas terdiri dari partisipasi sosial, transparansi dan akuntabilitas sosial. Lembaga wakaf memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam mengurangi kemiskinan. Sebuah studi dari lembaga wakaf diusulkan oleh Ahmad-Zamri (2010). Penelitian ini difokuskan pada konteks suci akuntabilitas di lembaga wakaf Malaysia. Ahmad-Zamri (2010) meneliti manajemen wakaf dari perspektif LSM dan hubungannya dengan penerima manfaat. Tidak adanya kebutuhan partisipasi dari masyarakat setempat atau penerima manfaat dapat menyebabkan munculnya masalah akuntabilitas. Oleh karena itu, studi memberikan pandangan bahwa akuntabilitas dalam wakaf tidak hanya alat monitoring untuk organisasi, tetapi juga bagian dari kemampuan organisasi dalam mengajar para penerima manfaat dalam hal partisipasi. Dengan kata lain, sistem kepercayaan partisipasi sosial akan mengurangi kemiskinan di kebutuhan sosial dan mencapai akuntabilitas kepada Allah. Dalam hal yang sama, Nahar dan Yaacob (2011) membahas manajemen wakaf dalam hal akuntabilitas dalam manajemen, akuntansi dan pelaporan di lembaga tunai wakaf Malaysia. Studi mereka menyatakan pentingnya mengungkapkan transparansi akuntansi dan pelaporan di lembaga-lembaga wakaf.

Selanjutnya, Siraj dkk. (2007) akuntabilitas studi di tempat-tempat keagamaan: di masjid-masjid di Malaysia. Memeriksa praktek manajemen keuangan di masjid Malaysia merupakan tujuan dari studi mereka. Masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial seperti seminar, forum, kursus singkat dan praktek pendidikan sebagai bagian dari akuntabilitas sosial (Siraj et al., 2007). Ini berarti bahwa masjid adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dan praktek manajemen karena keuangan yang penting dalam mendukung akuntabilitas. Dengan demikian, studi yang berhubungan dengan studi ini, karena penelitian ini akan fokus pada akuntabilitas masjid dalam mengelola dana mereka. Sulaiman et al. (2008) juga mempelajari

akuntabilitas dalam masjid. Tujuan penelitian mereka adalah untuk menguji akuntabilitas dari prosedur pengendalian internal yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan dan pencairan dana di masjid negara Malaysia Barat. Sumber daya keuangan di masjid-masjid negara Malaysia umumnya berasal dari kas: sehingga mereka harus memiliki sistem pengendalian internal yang berhubungan dengan hak asuh fisik, pemisahan tugas, otorisasi, catatan transaksi, dan rekonsiliasi dana periodik (Sulaiman et al, 2008.). proses-proses tersebut merupakan bagian dari kegiatan akuntabilitas dalam organisasi untuk menghindari penggelapan dana publik (Bowrin, 2004). Oleh karena itu, studi ini mirip dengan Siraj et al. (2007) dan Sulaiman et al. (2008) sampai batas tertentu, karena fokus pada masjid dan akuntabilitas. Namun, penelitian ini berbeda karena berfokus pada pengelolaan dana.

Jayasinghe dan Soobaroyen (2009) mempelajari persepsi akuntabilitas dalam Hindu dan organisasi keagamaan Buddha. Studi mereka menemukan bahwa non-Barat Budha dan Hindu masyarakat terikat oleh "roh" agama yang tinggi. Hal ini menyebabkan praktek informal dan sosial, bukan untuk mekanisme formal. Sistem kepercayaan dalam konteks ini cenderung berhubungan dengan semangat dalam ritual seremonial. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Hindu dan Budha harus memberikan pelayanan yang terbaik dalam ritual seremonial. Buddha dan Hindu memiliki semangat keagamaan dalam membuat kinerja publik yang tepat dan ritual organisasi (Jayasinghe dan Soobaroyen, 2009). Oleh karena itu, akuntabilitas dalam organisasi Hindu dan Buddha berasal dari upacara ritual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa agama-agama yang berbeda memiliki perspektif akuntabilitas berbeda dalam hal sistem kepercayaan dan aplikasinya dalam organisasi, lembaga dan individu.

Dari pembahasan diatas, ada beberapa celah literatur bahwa penelitian ini. Studi sebelumnya digunakan studi kuantitatif, metode triangulasi (Said et al, 2013) (Nahar & Yaacob, 2011; Sulaiman et al, 2008; Siraj et al, 2007), dan studi kualitatif (Ahmad - Zamri, 2010; Afifuddin & Nabiha, 2010). Ini berarti bahwa ada kurangnya studi akuntabilitas masjid dengan menggunakan studi kualitatif. Selain itu, penelitian sebelumnya (Kata et al., 2013) melakukan penelitian tentang masjid tanpa hubungan akuntabilitas. Namun, Sulaiman et al. (2008) dan Siraj et al. (2007) menggunakan kerangka akuntabilitas melalui metodologi dicampur dalam masjid Malaysia. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia. Tetapi, studi ini mengeksplorasi akuntabilitas secara keseluruhan dalam hal proses akuntabilitas di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan akuntabilitas modifikasi kerangka yang memperluas pemahaman tentang kerangka akuntabilitas dalam Shahul-Hameed (2000) dengan mengangkat mekanisme akuntabilitas yang diusulkan oleh Ebrahim (2003). Kerangka kerja ini berguna untuk mendekati tujuan dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa kerangka ini dapat menyebabkan menjawab tujuan dalam penelitian ini. Ada tiga masjid yang diteliti dalam studi ini, yang berarti bahwa 16 orang menjadi narasumber. Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, catatan lapangan dan analisis dokumen sebagai pengumpulan data. Wawancara semi - terstruktur digunakan sebagai metode untuk mendapatkan persepsi komite masjid'. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi Miles dan Huberman ini metodologi analisis data melalui pendekatan hermeneutik.

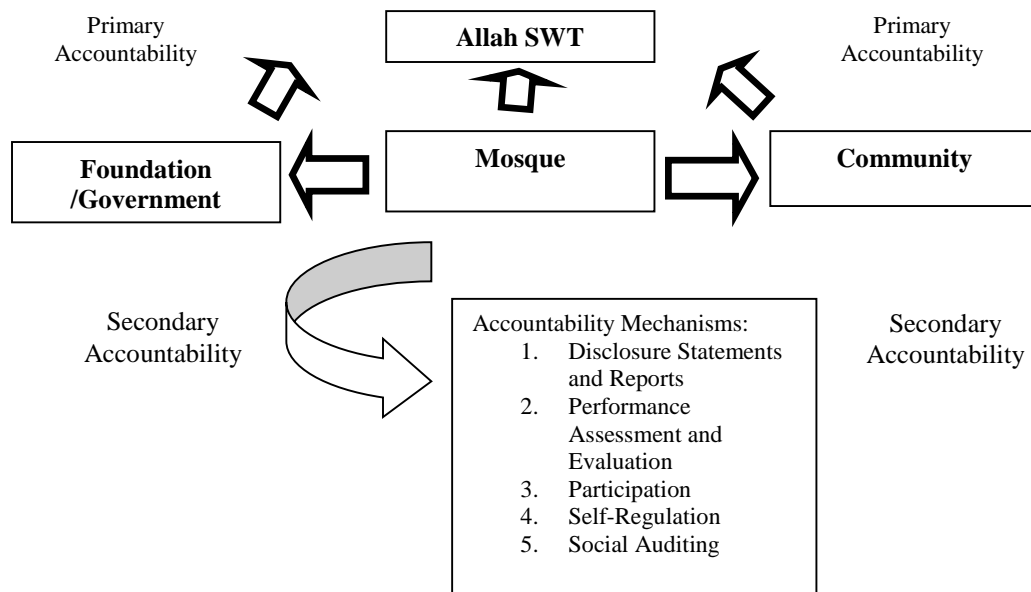


Fig1. Concept of Accountability Framework (modified from Shahul-Hameed, 2000)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Umumnya, semua masjid di Balikpapan Kalimantan Timur didasarkan pada pengembangan kegiatan. Dengan kata lain, semua masjid yang dibangun berdasarkan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, tipologi yang berbeda dari masjid memiliki karakteristik yang berbeda dalam memberikan mekanisme akuntabilitas mereka. Ada beberapa temuan dalam bab ini didasarkan pada bab sebelumnya. Temuan terdiri dari tipologi masjid (yayasan, pemerintah dan masyarakat) dalam memberikan mekanisme akuntabilitas. Selain mekanisme akuntabilitas yang diusulkan oleh Ebrahim (2003), peneliti menunjukkan bentuk informal mekanisme akuntabilitas dalam penelitian ini. Selain itu, ada diusulkan kerangka akuntabilitas dalam masjid di Balikpapan Kalimantan Timur.

Ada tiga jenis masjid tipologi di Balikpapan, Kalimantan Timur, yaitu masjid yayasan, masjid pemerintah, dan masjid komunitas. Pertama, masjid yayasan memiliki partisipasi yang diindikasikan sebagai formal dan informal dalam memberikan pertanggungjawaban. Evaluasi di masjid yayasan adalah konduksi komunikasi dialektis melalui pelaporan. Semua masjid menyampaikan evaluasi mereka secara resmi. Ada media komunikasi yang terdeteksi di semua masjid. Ini menunjukkan bentuk informal akuntabilitas. Namun, hanya masjid yayasan memiliki radio sebagai media komunikasi selain pelaporan keuangan di papan pengumuman mereka. Hal ini menunjukkan akuntabilitas resmi melalui media (Jayasinghe & Soobaroyen, 2009) dalam rangka untuk memberikan gagasan akuntabilitas. Selain itu, peran pengendalian intern sangat diperlukan dalam hal keamanan. Tampaknya dalam kegiatan keuangan di masjid-masjid melalui mengumpulkan dan menghitung uang publik. Misalnya, pekerjaan yang terpisah dari komite masjid, dan ada kegiatan verifikasi di semua masjid. Namun, masih ada kurangnya sistem keamanan di beberapa masjid, seperti hilangnya kotak amal. Yang penting adalah stabilisasi lingkungan (Bowrin 2004) dalam rangka mencapai akuntabilitas. Dengan demikian, manajemen pengelolaan dana mereka efektif.

Kedua, ada masalah sistem birokrasi dalam memberikan tindakan akuntabilitas dalam masjid pemerintah. Sistem birokrasi juga ditemukan dalam penelitian ini yang memberi pengaruh untuk struktur organisasi dan mekanisme akuntabilitas. Hal ini menyebabkan munculnya kepercayaan melalui tindakan akuntabilitas. Dengan demikian, maka akan mengkonfirmasi aktivitas akuntabilitas yang efektif dalam organisasi. Selain sistem birokrasi juga ditemukan dalam gagasan pengaturan diri. Semua peraturan berasal dari masjid pemerintah tetapi pemerintah masih tidak memenuhi peraturan tersebut.

Ketiga, masjid komunitas memiliki pengaruh politik dalam mendukung mekanisme akuntabilitas. Hal ini menyebabkan memperoleh dana untuk kegiatan keagamaan. Semua masjid mengungkapkan laporan mereka secara resmi. Namun, hanya masjid komunitas memiliki kurangnya pengetahuan dalam kategorisasi rekening mereka. Hal ini menunjukkan kurangnya keterampilan akuntansi. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memberikan masjid pelatihan keterampilan dalam keterbukaan keuangan dan pelaporan. Dengan demikian, hal ini juga perlu memiliki karyawan mampu berkomunikasi bahasa dalam laporan keuangan (Zaid, 2000) dalam rangka mencapai akuntabilitas. Selain itu, ada audit sosial di semua masjid. Berdasarkan temuan, ada dua jenis masjid melakukan audit sosial. Namun, masyarakat dan beberapa masjid yayasan melakukan audit sosial sebagai tindakan monitoring. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan audit sosial dalam organisasi non-profit (masjid) (Ebrahim, 2003; Gray et al, 1996) untuk menghindari penggelapan dana.

Selain itu, temuan merekomendasikan kerangka akuntabilitas berdasarkan tipologi dan ketersediaan mekanisme akuntabilitas. Telah ditemukan bahwa kategorisasi akuntabilitas formal dan informal tidak jelas dalam pengaturan agama. Selain itu, tipologi masjid menentukan apakah mekanisme formal atau informal. Kerangka akuntabilitas menggambarkan bahwa bentuk-bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas formal dan informal) disusun untuk mencapai akuntabilitas kepada Allah. Oleh karena itu, reciprocalness dari dua bentuk akuntabilitas memimpin manusia sebagai khalifah Allah untuk memenuhi nya akuntabilitas kepada masyarakat dan kepada Allah. Singkatnya, manusia melakukan akuntabilitas mereka sebagai bagian dari ibadah mereka kepada Allah.

SIMPULAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perbaikan masjid di Kalimantan Timur. Mekanisme akuntabilitas akan memimpin organisasi keagamaan untuk meningkatkan proses akuntabilitas. Oleh karena itu, keterampilan manusia harus mengembangkan untuk mengelola dana tersebut dalam organisasi. Memang, gagasan akuntabilitas dalam formal dan informal akan membantu untuk mengontrol proses akuntabilitas di masjid Kalimantan Timur. Ada beberapa saran untuk penelitian masa depan di lapangan. Pertama, sejak diwawancarai dipilih terbatas di Kalimantan Timur, khususnya di Indonesia, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di kota-kota lain atau negara lain. Kedua, karena penelitian dilakukan di Indonesia, penelitian masa depan dapat dilakukan dalam studi banding tentang masjid di dua negara Muslim lain dalam hal proses akuntabilitas di masjid-masjid. Terakhir, ada beberapa temuan tentang infaq, sadaqah dan zakat secara umum. Penelitian lebih lanjut bisa memeriksa akuntabilitas dalam zakat di lembaga-lembaga lain seperti zakat organisations. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membuat perspektif akuntabilitas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, A. R. (2010) *An Introduction to Islamic Accounting Theory and Practice*, Kuala Lumpur: Centre for Research and Training.
- Abdul Rahman, A. R. and Goddard, A. (1998), 'An Interpretative Inquiry of Accounting Practices in Religious organizations,' *Financial Accountability & Management*, 14 (3), 183-201.
- Adnan, M. A. (2013), 'An Investigation of the Financial Management Practices of the Mosques in the Special Region of Yogyakarta Province, Indonesia,' *Proceeding of Sharia Economics Conference-Hannover*, 9 February.
- Afifuddin, H. B. and Siti-Nabiha, A.K. (2010), 'Towards Good Accountability: The Role of Accounting in Islamic Religions,' *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 42, 1119-1125
- Ahmad-Zamri, O. (2010), 'Accountability of waqf management: insight from praxis of nongovernmental organization (NGO),' paper presented at the 7th International Conference- The Tawhidic Epistemology, Zakat and Waqf Economy, Bangi.
- Ahmad-Zamri, O. (2012), 'Accountability in managing waqf properties: the case of two State Religious Councils in Malaysia,' PhD Thesis. Royal Holloway University of London.



- Al-Faruqi, I. R. (1995), *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Safi, A. K. (1992), *Accountability: Islam versus the Man-made Doctrines*, Kuala Lumpur: Darulfikr.
- Boland, R. J. and Schultze, U. (1996), 'Narrating accountability: cognition and the production of the accountable self,' In Munro, R. & Mouritsen, J. (eds.), *Accountability: Power, ethos, and the technologies of managing*, (pp. 62-81). London: International Thomson business press.
- Booth, P. (1993), 'Accounting in Churches: A Research Framework and Agenda,' *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 6 (4), 37-67.
- Bowrin, A. R. (2004), 'Internal control in Trinidad and Tobago religious organizations,' *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17 (1), 121-152.
- Davison, J. (2004), 'Sacred vestiges in financial reporting Mythical Readings guided by Mircea Eliade,' *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17 (3), 476-497.
- Dhanani, A. & Connolly, C. (2012), 'Discharging not-for-profit accountability: UK charities and public discourse,' *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 25 (7), 1140-1169.
- Duncan, J. B. and Flesher, D. L. (2002), 'Does your church have appropriate internal control for cash receipt?,' *National Public Accountant*, 47, 15-20.
- Duncan, J. B., Flesher, D. L., and Stocks, M. H. (1999), 'Internal Control Systems in US Churches: An Examination of the Effects of Church Size and Denomination on Systems of Internal Control,' *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 12 (2), 142-163.
- Ebrahim, A. (2003), 'Accountability in practice: mechanisms for NGOs,' *World Development*, 31 (5), 813-829.
- Edwards, R. K. (1990), 'Financial accountability in religious organizations,' *The National Public Accountant*, 1-5.
- Fremont-Smith, M.R. (2004), 'Pillaging of charitable assets: Embezzlement and fraud,' *Exempt Organization Tax Review*, 46(33), 333-346.
- Gibelman, M. and Gelman, S. R. (2001), 'Very Public Scandals: Nongovernmental Organization in Trouble,' *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organization*, 12 (1), 49-66.
- Gibelman, M., and Gelman, S. R. (2002), 'Should we have faith in faith-based social services? Rhetoric versus realistic expectations,' *Nonprofit Management & Leadership*, 13(1), 49-65.
- Gray, R., Owen D. and Adams, C. A. (1996), *Accounting & accountability: changes and challenges in corporate social and environmental reporting*, London, Prentice Hall.
- Greenlee, J., Fischer, M., Gordon, T., and Keating, E. (2007), 'An investigation of fraud in nonprofit organizations: Occurrences and deterrents,' *Nonprofit and Voluntary Sector*, 36(4), 676-694.
- Hardy, L. and Ballis, H. (2013), 'Accountability and Giving Accounts,' *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26 (4), 539-566.
- Hopwood, A. G. (1983), 'On Trying to Study Accounting in the Contexts in which it operates,' *Accounting, Organizations & Society*, 8 (2), 287-305.
- Huque, A. S. (2011), 'Accountability and Governance: strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh,' *International Journal of Productivity and Performance Management*, 60 (1), 59-74.
- Jackling, Beverley, Cooper, Barry J., Leung, Philomena and Dellaportas, Steven (2007), 'Professional accounting bodies' perceptions of ethical issues, causes of ethical failure and ethics education,' *Managerial auditing journal*, 22 (9), 928-944

-
- Jayasinghe, K. and Soobaroyen, T. (2009), 'Religious "Spirit" and Peoples' Perceptions of Accountability in Hindu and Buddhist religious Organizations,' *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22 (7), 997-1028.
- Laughlin, R. C. (1988), 'Accounting in its Social context: An analysis of the Accounting Systems of the Church of England,' *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1 (2), 19-42.
- Laughlin, R. C. (1990), 'A model of Financial Accountability and the Church of England,' *Financial Accountability and Management*, 6 (2), 93-114.
- Lee, J. (2004), 'NGO Accountability: Rights and Responsibilities,' *Centre for Applied Studies in International*.
- Nahar, H. S. and Yaacob, H. (2011), 'Accountability in the sacred context: The case of management, accounting and reporting of a Malaysian cash awqaf institution,' *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2 (2), 87-113.
- O'Dwyer, B. and Unerman, J. (2007), 'From Functional to Social Accountability,' *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20 (3), 446-471.
- Paul, S. (1992), 'Accountability in Public Service: Exit, Voice and Control,' *World Development*, 20 (7), 1047-1060.
- Quattrone, P. (2004), 'Accounting for God: accounting and accountability practices in the Society of Jesus (Italy, XVI-XVII centuries),' *Accounting, Organizations and Society*, 29, 647-683.
- Roberts, J. and Scapens, R. (1985), 'Accounting systems and system of Accountability: Understanding accounting practices in their organizational context,' *Accounting, Organizations and Society*, 10 (4), 443-456.
- Said, J., Mohamed, A., Sanusi, Z. M., Yusuf, S. N. S. (2013), 'Financial Management Practices in Religious Organizations: An Emperical Evidence of Mosque in Malaysia,' *International Business Research*, 6 (7), 111-119.
- Scott, C. (2000), 'Accountability in Regulatory State,' *Journal of law and society*, 27 (1), 38-60.
- Seal, W. and Vincent-Jones, P. (1997), 'Accounting and trust in the enabling of long-term relations,' *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 10 (3), 406-431.
- Shahul-Hameed, M. I. (2000), *The Need for Islamic Accounting: Perceptions of its Objectives and Characteristics by Malaysian Accountants and Academics*, Ph.D. Thesis. University of Dundee.
- Siraj, S. A., Ibrahim, S. H. M., and Sulaiman, M. (2007), 'The Financial Management Practices of State Mosques in Peninsular Malaysia,' *Indonesian Management & Accounting Research*, 6 (2), 65-86.
- Sulaiman, M., Siraj, S. A. and Ibrahim, S. H. M. (2008), 'Internal control systems in West Malaysia's State Mosques,' *American Journal of Islamic Social Sciences*, 25 (1), 63.
- Zaid, O. M. (2000), 'The appointment qualifications of Muslim accountants in the Middle Ages,' *Accounting Education*, 9 (4), 329-342.